



## ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA DI HAURGEULIS

Dea Nur Fatimah<sup>1</sup>, Luthfia Nur Afifah<sup>2</sup>, Maulida Putri Ariza<sup>3</sup>, Dede Indra Setiabudi<sup>4</sup>  
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara  
satriomandiri1999@gmail.com

### ABSTRACT

Citizens are members of a country or members of a community that forms the country itself. Obligation is something that must be done with full sense of responsibility. The obligation of citizens is something that must be carried out as citizens. The obligations of citizens cannot be separated from the rights of citizens. Every citizen has obligations. There is the 1945 Constitution which discusses the obligations of citizens. And there are several examples of citizen obligations that must be carried out, as well as violations of citizen obligations in them

### Article History

Received: 20 Juni 2023  
Reviewed: 30 Juni 2023  
Published: 3 Juli 2023

### Key Words

Public Awareness of  
Obligations; Examples of  
Violations of Citizenship  
Duties .

### ABSTRAK

Warga negara merupakan anggota dari suatu negara atau anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai warga negara. Kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan dengan hak warga negara. Setiap warga negara mempunyai kewajibannya. Terdapat UUD 1945 yang membahas kewajiban warga negara. Dan terdapat beberapa contoh kewajiban warga negara yang wajib dilaksanakan, serta terdapat pelanggaran kewajiban warga negara di dalamnya

### Sejarah Artikel

Received: 20 Juni 2023  
Reviewed: 30 Juni 2023  
Published: 5 Juli 2023

### Kata Kunci

Kesadaran Masyarakat  
Terhadap Kewajiban;  
Contoh Pelanggaran  
Kewajiban Warga Negara.



## **Pendahuluan**

Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita memahami arti dari kewajibannya sebagai warga negara. Dengan tujuan agar setiap warga negara dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai warga negara. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga masyarakat banyak yang mengingkari dan melanggar kewajibannya.

Kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28J ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 30 ayat 1. Yang meliputi bidang: politik dan pemerintahan, soial, agama, pendidikan, dan pertahanan. Dari pasal yang membahas tentang kewajiban warga negara dalam UUD 1945 terdapat makna serta contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat beberapa kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan oleh warga negara, pelanggaran kewajiban sebagai warga negara yang dapat di temui di lingkungan masyarakat khususnya Haurgeulis yang akan dibahas. Serta alasan yang membuat masyarakat melakukan pelanggaran kewajibannya sebagai warga negara. Termasuk upaya yang dilakukan terkait pelanggaran kewajiban warga negara.

Pengingkaran kewajiban warga negara dapat terjadi karena adanya pelanggaran hak. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang dapat melanggar hak dan mengingkari kewajibannya. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan untuk menghilangkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

Penelitian ini berisikan tentang pengertian dari kewajiban, mengetahui faktor-faktor dan alasan penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban, serta bentuk kasus dari pelanggaran kewajiban masyarakat sebagai warga negara di lingkungan sekitar terutama di Haurgeulis. Serta dapat mengetahui upaya dalam menghilangkan pelanggaran kewajiban warga negara di Indonesia terutama di Haurgeulis.

Kesadaran berbangsa dan bernegara artinya sikap dan perilaku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu berkorelasi dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945).

## **Metode Penelitian**

Penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (library research) dan menganalisis langsung kesadaran masyarakat terhadap kewajiban di Haurgeulis. Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang digunakan dengan literatur, berupa buku, catatan, maupun hasil dari penelitian yang terdahulu. Dengan berisikan pengertian kewajiban, UUD 1945 mengenai kewajiban warga negara, contoh kewajiban warga negara, pelanggaran kewajiban warga negara, alasan mengapa masyarakat melakukan pelanggaran warga negara, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban sebagai warga negara.

Beberapa contoh dari kewajiban warga negara dan pelanggarannya di Haurgeulis, dalam penelitian ini, penulis melihat langsung kondisi dan situasi setempat di Alun-alun



Haurgeulis, Gg Kauman Haurgeulis, dan Jl Cipancuh, dan dengan begitu terdapat kurangnya kesadaran pada diri masyarakat yang menjadi salah satu penyebab mereka melakukan pelanggaran.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Kewajiban**

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara bersifat wajib, tetapi tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang harus dilakukan warga negara sesuai dengan keistimewaan warga negara lainnya.

Pengertian kewajiban seorang warga negara Indonesia memiliki hak tertentu juga memiliki kewajiban. Sebagai warga Negara yang baik tentunya kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kepincangan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertian dari kewajiban.

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya yaitu mentaati peraturan lalu lintas, melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan, sebagai pelajar harus rajin belajar, melaksanakan tugas yang diberikan bapak/ibu guru dengan sebaik-baiknya, dan masih banyak lagi.

### **2. Kewajiban warga negara menurut UUD 1945**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang membahas tentang kewajiban warga negara:

- Pasal 27 ayat 1 dan 3:
  1. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
  3. "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
- Pasal 28J ayat 1 dan 2:



1. "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
  2. "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
- Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
  - Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

### 3. Kewajiban warga negara dan pelanggaran kewajiban warga negara

Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya.

Berikut terdapat beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia adalah:

- A. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
- B. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
- C. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- D. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- E. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme masyarakat yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran kewajiban oleh warga negara.

Pelanggaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, bentuk-bentuk pelanggaran kewajiban masyarakat sebagai warga negara terutama di lingkungan Haurgeulis:

- A. Membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sebebannya.
- B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu rambu



lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.

- C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
- D. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya.
- E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pelanggaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pelanggaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.

#### **4. Faktor dan alasan penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban warga negara**

Faktor dan alasan penyebab pelanggaran kewajiban warga negara adalah ketidakpuasan masyarakat itu sendiri. Jika dielaborasi, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Selain karena alasan ketidakpuasan masyarakat, ada sejumlah faktor penyebab pelanggaran kewajiban warga negara lainnya.

Setiap permasalahan pasti ada pemicunya hal ini pun berlaku bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara dapat dipicu dari beberapa hal berikut

- A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
- B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
- C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain.
- D. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.
- E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi



munculnya kasus kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

- F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

Tindakan terbaik dalam penegakan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

### **5. Upaya kewajiban warga negara**

Upaya kewajiban warga negara merujuk pada tindakan yang diambil oleh warga negara untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap negara dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh upaya kewajiban warga negara:

- Mematuhi hukum dan peraturan: Sebagai warga negara yang baik, penting untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ini termasuk mengikuti peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi peraturan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Mengambil bagian dalam proses demokrasi: Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum, mempelajari dan memahami isu-isu politik, serta berperan aktif dalam diskusi dan debat yang mempengaruhi kebijakan publik. Setiap Permasalahan pasti ada pemicunya. Hal ini pun berlaku bagi pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban.
- Melakukan tugas wajib: Beberapa negara mungkin memiliki tugas wajib yang harus dilakukan oleh warganya, seperti dinas militer atau layanan publik. Melaksanakan tugas wajib ini adalah bentuk upaya kewajiban warga negara.
- Menghormati hak asasi manusia: Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia setiap orang, termasuk hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak individu lainnya. Memerangi diskriminasi dan intoleransi adalah juga bagian dari upaya kewajiban warga negara.



- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan sukarela: Warga negara dapat berkontribusi pada masyarakat dengan terlibat dalam kegiatan sosial atau sukarela. Misalnya, mereka dapat membantu dalam program pengentasan kemiskinan, membersihkan lingkungan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, atau menjadi relawan di organisasi nirlaba.
- Meningkatkan pendidikan dan kesadaran: Warga negara yang bertanggung jawab juga berusaha meningkatkan pendidikan dan kesadaran diri serta orang lain di sekitar mereka. Mereka dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan.

Upaya bagi seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu dengan menumbuhkan sikap rasa kesatuan dan persatuan bangsa bernegara. Serta rasa kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Karena sejatinya bangsa Indonesia mempunyai banyak suku bangsa yang mempunyai bahasa adat istiadat yang berbeda. Kepolisian juga harus andil dalam menangani kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan. Seperti memberikan hukum dan juga sanksi yang adil bagi pelaku.

Upaya kewajiban warga negara merupakan cara untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, warga negara dapat membantu memajukan negara mereka dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berisi pembahasan untuk mengetahui dan memahami kewajiban, dimulai dari pengertian, kewajiban warga negara menurut UUD 1945, kewajiban warga negara serta pelanggarannya, alasan terjadinya pelanggaran kewajiban warga negara, dan upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang mempunyai kaitan erat dimana dalam menjalankannya harus seimbang. Setiap orang yang ingin mempunyai hak nya harus melakukan kewajibannya juga. Dimana pengertian hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap individu sejak didalam kandungan, sedangkan kewajiban memiliki arti segala tugas atau keharusan seseorang atau individu dalam menjalankan perannya guna mendapatkan haknya.

Adanya peraturan yang mengatur penjaminan kewajiban belum mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran kewajiban secara maksimal karena nyatanya sampai sekarang masih marak terjadi pelanggaran kewajiban mulai dari yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Hal ini menyatakan bahwa peraturan saja tidak cukup untuk menjamin kewajiban seseorang, diperlukan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjalankan dan menjaga kewajiban antar individu.

Untuk mencapai hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki kualitas aparatnya sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah serta pemerintah juga harus memaksimalkan lembaga lembaga yang sudah ada. Masyarakat juga harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga dan menghargai hak dan kewajiban bukan hanya untuk dirinya



---

sendiri akan tetapi juga untuk hak dan kewajiban orang lain karena pada akhirnya hak kewajiban seseorang dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain.

### **Referensi**

- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). TINJAUAN PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5, 837-845.
- Sodeli, M., & Lubis, Y. (2018). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD).
- Tasum, & Apriani, R. (2019). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 3
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat 1 dan 2
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2